

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 516-519**  
 Licenced by CC BY-SA 4.0  
 E-ISSN: 2986-6340  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12735759>

## **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Daerah Manado Dengan Metode Studi Literatur**

**Ivan Darmawan<sup>1</sup>, Nur Aisyah<sup>2</sup>, Fayyaza Azwa Aulia<sup>3</sup>, Olivia<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran

Email: [ivan.darmawan@gmail.com](mailto:ivan.darmawan@gmail.com)<sup>1</sup>, [nuraisyah3334@gmail.com](mailto:nuraisyah3334@gmail.com)<sup>2</sup>, [ayyaazwaa@gmail.com](mailto:ayyaazwaa@gmail.com), [oliviaaflsh@gmail.com](mailto:oliviaaflsh@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstract**

*This research aims to examine the implementation of regional government information systems in Manado City with a focus on the Regional Planning, Research and Development Agency (Bapelitbangda). The method used is a literature study which includes analysis of various sources of related information. The research results show that the implementation of regional government information systems has a significant impact on the efficiency and effectiveness of public administration.*

**Keywords:** *Information Systems, Regional Government, Manado City, Bapelitbangda, Literature Study*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di Kota Manado dengan fokus pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). Metode yang digunakan adalah studi literatur yang mencakup analisis berbagai sumber informasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan daerah memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas administrasi publik.

**Kata Kunci:** *Sistem Informasi, Pemerintahan Daerah, Kota Manado, Bapelitbangda, Studi Literatur*

---

#### **Article Info**

Received date: 28 June 2024

Revised date: 05 July 2024

Accepted date: 12 July 2024

### **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 tentang pemerintahan daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014, maka menteri dalam negeri mengeluarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Lampiran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappelitbangda bertugas Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas bagi perumusan kebijakan dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan berikutnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah badan inilah yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah. Dalam membantu mencapai tujuan tersebut maka Bapelitbangda menggunakan system yang dapat mengoptimalkan kinerjanya agar dapat memberikan kualitas yang baik. (Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. 2021)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online dipusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini puladapat digunakan untuk mendukung integrase pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. (Taliziduhu Ndraha, 2019) SIPD berfungsi pula sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Didalam aplikasi SIPD salah satunya mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan daerah yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. SIPD salah satu program kegiatan yang diberlakukan secara nasional. (Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. 2021)

Pemerintah Kota Manado Merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai salah satu inovasi berbentuk aplikasi pemerintahan sesuai dengan amanat dari Permendagri No.70 Tahun 2019 pengganti dari Permendagri No.98 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di Kota Manado?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut?
3. Bagaimana dampak implementasi sistem informasi terhadap efisiensi dan efektivitas administrasi publik di Bapelitbangda Kota Manado?

### **Tujuan**

1. Mengidentifikasi proses implementasi sistem informasi di Bapelitbangda Kota Manado.
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi selama proses implementasi.
3. Menilai dampak implementasi sistem informasi terhadap efisiensi dan efektivitas kerja di Bapelitbangda Kota Manado.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, laporan resmi, dan dokumen terkait lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Proses Implementasi Sistem Informasi**

Proses implementasi sistem informasi di Bapelitbangda Kota Manado melibatkan beberapa tahap utama yang perlu dijalankan secara sistematis dan terstruktur agar sistem dapat berfungsi dengan optimal. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan. (Reksohadiprodjo, Sukanto, 2018)

#### **1. Perencanaan**

Tahap perencanaan adalah fase awal yang sangat penting dalam implementasi sistem informasi. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan analisis masalah yang ada serta ekspektasi pengguna. Tujuan dari sistem juga ditetapkan pada tahap ini, yang mencakup peningkatan

efisiensi administrasi, peningkatan kualitas layanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Selama fase perencanaan, dilakukan juga penentuan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak. Selain itu, dibuatlah jadwal proyek yang mencakup semua tahapan implementasi hingga evaluasi sistem. (Reksohadiprodo, Sukanto, 2018)

## 2. Pengembangan

Tahap pengembangan melibatkan desain dan pengujian sistem informasi. Desain sistem mencakup pembuatan arsitektur sistem yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen sistem akan saling berinteraksi. Desain ini juga mencakup pemilihan teknologi yang akan digunakan, seperti basis data, antarmuka pengguna, dan protokol komunikasi. Setelah desain selesai, dilakukan pengkodean perangkat lunak yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan sistem. Pengujian sistem dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan yang mungkin terjadi sebelum sistem diluncurkan.

## 3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah fase di mana sistem informasi yang telah dikembangkan mulai digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, dilakukan pelatihan bagi pengguna sistem untuk memastikan bahwa mereka memahami cara mengoperasikan sistem dengan benar. Pelatihan ini mencakup cara menggunakan perangkat lunak, memahami fungsionalitas sistem, serta cara menangani masalah yang mungkin muncul. Selain pelatihan, tahap pelaksanaan juga mencakup instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, konfigurasi sistem, serta integrasi dengan sistem yang sudah ada. Setelah sistem berjalan, dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dengan optimal dan untuk memperbarui sistem sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.

### **Kendala dalam Implementasi**

Meskipun implementasi sistem informasi memiliki banyak manfaat, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat prosesnya. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi di Bapelitbangda Kota Manado meliputi (Trisnawati, Sule, E. dan Saefullah. Kurniawan, 2020):

#### 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terampil

Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang teknologi informasi. Banyak pegawai yang belum terbiasa dengan penggunaan sistem informasi, sehingga diperlukan waktu dan usaha lebih untuk melatih mereka agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik.

#### 2. Resistensi terhadap Perubahan

Perubahan selalu menghadapi resistensi, terutama dari pegawai yang sudah terbiasa dengan cara kerja konvensional. Mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dibawa oleh implementasi sistem informasi dan cenderung menolak atau tidak antusias dalam menggunakan sistem baru. Hal ini memerlukan pendekatan yang baik dalam manajemen perubahan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat menerima dan mendukung implementasi sistem.

#### 3. Keterbatasan Anggaran

Implementasi sistem informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pengembangan perangkat lunak, pembelian perangkat keras, pelatihan pegawai, hingga pemeliharaan sistem. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi hambatan utama dalam memastikan semua aspek dari implementasi dapat terpenuhi dengan baik.

#### 4. Infrastruktur

Teknologi yang Belum Memadai Infrastruktur teknologi yang kurang memadai, seperti konektivitas internet yang buruk dan perangkat keras yang tidak memadai, dapat menghambat kelancaran operasional sistem informasi. Hal ini memerlukan investasi tambahan untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur agar sesuai dengan kebutuhan sistem. (Trisnawati, Sule, E. dan Saefullah. Kurniawan, 2020)

### Dampak Implementasi

Implementasi sistem informasi di Bapelitbangda Kota Manado telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja administrasi publik. Beberapa dampak utama yang dapat diamati adalah (Sarwoto. 2019):

- a. Peningkatan Efisiensi Kerja Dengan adanya sistem informasi, banyak proses administrasi yang dapat diotomatisasi sehingga mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin. Hal ini memungkinkan pegawai untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan bernilai tambah.
- b. Peningkatan Efektivitas Layanan Publik Sistem informasi memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap informasi, baik bagi pegawai pemerintah maupun masyarakat umum. Hal ini meningkatkan efektivitas layanan publik, karena permintaan dan pengaduan dari masyarakat dapat ditangani dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, transparansi informasi juga meningkat, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Dengan sistem informasi, semua proses dan transaksi dapat dicatat dan dipantau dengan lebih baik. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik, karena semua tindakan dan keputusan dapat dilacak dan diaudit dengan lebih mudah.

### SIMPULAN

Meskipun terdapat berbagai kendala dalam implementasi sistem informasi di Bapelitbangda Kota Manado, dampak positif yang dihasilkan sangat signifikan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi publik serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah beberapa manfaat utama yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus dalam mengatasi kendala yang ada dan memastikan dukungan berkelanjutan dalam hal pelatihan dan pengembangan infrastruktur untuk mencapai hasil yang optimal

### REFERENSI

- Taliziduhu Ndraha.(2019). *Kybernology Ilmu Pemerintahan* jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri No.70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Mokalu, T. M., Nayoan, H., & Sampe, S. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)*.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Trisnawati, Sule, E. dan Saefullah. Kurniawan. 2020. *Pengantar Manajemen*. edisi pertama, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Sarwoto. 2019. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*.Cetakan keenambelas, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta